

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, H.M., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti, Verstappen, Leon C.A., Kolkman, Wilbert D., Bosko, Rafael Edy, 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Kadir, Abdul, 2014, *Pengenalan Sistem Informasi: Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Khoidin, M., 2017, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustisia, Surabaya
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini, Widjaja, Gunawan, 2004. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak atas Tanah*, Pranada Media, Jakarta.
- Mulyadi, Deddy, Gedeona, Hendrikus T., Afandi, Muhammad Nur, 2016, *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik (Konsep & Praktik Administrasi dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi untuk Kinerja Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Rustam, Riky, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- Satrio, J., 1996, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan – Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Siagian, S.P. 1981, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Sinambela, Lijan Poltak, Rochadi, Sigit Ghazali, Rusman, Muksin, Akhmad, Setiabudi, Didit, Bima, Djohan, Syaifudin, 2016, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta

_____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Tesis

Abdul Manan, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Studi tentang Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan dan Jangka Waktu Pencatatan Pendaftaran Hak Tanggungan)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Risang Pujiyanto, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Rekrutmen CPNS Kementerian Perindustrian”, *Tesis*, Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Ronald Rizal, “Akibat Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan dan Pemberian Tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan yang Melewati Batas Waktu di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 2043.

Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632.

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tahun 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 21

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003

Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 5/SE-
100/I/2015 tentang Penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan.

Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tertanggal 27 April
2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

D. Internet

Anonim, “Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya”,
[https://idtesis.com/metodologi -penelitian-hukum-2/](https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/) diakses tanggal, 21
Juni 2017, pukul 23:56 WIB

Badan Pertanahan Republik Indonesia, “Layanan Pertanahan”,
site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx, diakses tanggal 9 September
2017, pukul 11.10 WIB

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi
Keempat*, PT. Gramedia, Jakarta.

Kansil, C.S.T. dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta.